

The Effect of Local Own-Source Revenue, Local Government Size, Capital Expenditure, and Social Assistance Expenditure on Internal Control Weaknesses: The Mediating Role of Economic Growth

Andini Ismayanti^{1*}, Agus Ismaya Hasanudin², Tri Lestari³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: Andini Ismayanti andiniismayanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Local Own-Source Revenue, Local Government Size, Capital Expenditure, Social Assistance Expenditure, Internal Control Weaknesses, Economic Growth

Received : 15 June

Revised : 20 July

Accepted: 31 August

©2026 Ismayanti, Hasanudin, Lestari:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to examine the effects of local own-source revenue, local government size, capital expenditure, and social assistance expenditure on internal control weaknesses, with economic growth serving as an intervening variable. The study employs secondary data obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) regional audit reports and local government financial reports covering the 2014–2023 period. The data were analyzed using EViews 12. The findings indicate that local own-source revenue has a positive effect on internal control weaknesses. In contrast, local government size has a negative effect on internal control weaknesses. Furthermore, capital expenditure and social assistance expenditure both exhibit positive effects on internal control weaknesses, with economic growth acting as an intervening variable. In addition, economic growth has a positive effect on internal control weaknesses

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Intervening*

Andini Ismayanti^{1*}, Agus Ismaya Hasanudin², Tri Lestari³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: Andini Ismayanti andiniismayanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, Kelemahan Pengendalian Internal, Pertumbuhan Ekonomi

Received : 15 June

Revised : 20 July

Accepted: 31 August

©2026 Ismayanti, Hasanudin, Lestari:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan belanja bantuan sosial terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPK daerah dan pemerintah daerah periode 2014 – 2023. Alat analisis yang digunakan adalah Eview 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal, variabel ukuran pemerintah berpengaruh negatif, belanja modal berpengaruh positif, variabel belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena berperan dalam melindungi aset negara, menjamin keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Di Indonesia, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Tahun 2023 mengungkapkan ribuan temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketidakefisienan pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Banten. Hasil pemeriksaan BPK pada beberapa pemerintah kabupaten/kota masih menemukan berbagai permasalahan, seperti pengelolaan aset tetap yang tidak memadai, ketidaksesuaian pelaksanaan belanja modal, potensi kerugian negara pada proyek infrastruktur, serta kelemahan dalam penatausahaan aset daerah (BPK Banten, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal dipengaruhi oleh karakteristik keuangan pemerintah daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Pemerintah daerah dengan aset, PAD, maupun belanja yang besar umumnya memiliki aktivitas pengelolaan keuangan yang lebih kompleks sehingga berpotensi meningkatkan risiko kelemahan pengendalian internal. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan penelitian lain menunjukkan tidak adanya pengaruh atau bahkan hubungan yang negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel belum dapat dijelaskan secara komprehensif.

Penelitian ini menawarkan pengembangan model dengan memasukkan **pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening***. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan memengaruhi efektivitas pengendalian internal karena peningkatan aktivitas ekonomi dapat memperbesar kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kompleksitas transaksi keuangan, volume belanja pemerintah, dan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Berdasarkan fenomena empiris, kesenjangan penelitian, dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan belanja bantuan sosial terhadap kelemahan pengendalian

internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

(Jensen & Smith, Jr., 2005) membahas tentang hubungan keagenan dimana *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain/manajemen (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Hubungan tersebut memberikan konsekuensi, bahwa manajemen (*agent*) berkewajiban untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanahkan oleh *principal*. Teori Agensi melihat bahwa Pemerintah Daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta menganggap bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori agensi, hal yang dilandasi adalah adanya perbedaan kepemilikan data, yaitu *agent* atau pemerintah daerah mempunyai akses informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari *principal* atau masyarakat. Pengawasan *principal* diperlukan untuk mengurangi terjadinya *fraud* terkait tindakan yang dilakukan oleh *agent*. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah akan menyebabkan adanya keseimbangan informasi yang diterima oleh *principal* atau masyarakat, sehingga terhindar dari asimetri informasi (Adiputra et al., 2018) dan kegiatan pengendalian internal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lebih terstruktur untuk mengurangi kecurangan atau *fraud*.

Ukuran Pemerintah Daerah

Total aset yang dimiliki pemerintah daerah menjadi ukuran besar/kecilnya suatu pemerintah daerah (Sari & Darmastuti, 2023). Total aset mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, termasuk aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya dan tercatat dalam laporan keuangan. Berdasarkan LHP BPK RI Provinsi Banten menemukan adanya permasalahan terkait pengelolaan aset tetap di beberapa tempat yang belum optimal (BPK Banten, 2023).

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, 2020). Belanja modal memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berfungsi sebagai sarana investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif teori agensi, pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai *principal* untuk mengelola sumber daya publik, termasuk dalam hal pengeluaran belanja modal. Hubungan ini menuntut agar pemerintah bertindak sepenuhnya untuk

kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi konflik kepentingan karena ketimpangan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai agent memiliki akses informasi yang lebih luas dan rinci dibanding masyarakat, sehingga ada celah bagi tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kepentingan publik. Teori agensi memberikan pemahaman bahwa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat adalah kunci untuk meminimalkan potensi konflik antara agent dan principal.

Kelemahan Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud* dan inefisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Kelemahan pengendalian internal dapat muncul ketika terdapat perbedaan antara tujuan manajer dan tujuan organisasi. Teori agensi digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agent/manajer (pemerintah daerah). Jika manajer tidak sepenuhnya berkomitmen bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi, maka penerapan pengendalian internal tidak akan efektif. Hal ini dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan, asimetri informasi dan moral hazard. Kelemahan sistem pengendalian internal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. (LHP) LKPD merujuk pada temuan-temuan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan atau kurang efektifnya pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas pemerintah daerah. Dalam hasil audit BPK yang dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdapat kelemahan pengendalian internal yang disajikan melalui tiga kategori utama yaitu (1) kelemahan pada struktur pengendalian internal; (2) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; dan (3) kelemahan sistem pengendalian dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I atas pemeriksaan LKPD Tahun 2023 ditemukan adanya 9.261 kasus temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakefisienan, ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18,19 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas ekonominya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdayanya. Besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan ekonominya (Anthony & Rohman, 2024). Suatu daerah diindikasikan mengalami pertumbuhan ekonomi jika tingkat aktivitas ekonomi yang dicapai saat ini lebih tinggi dari pada yang dicapai pada periode sebelumnya.

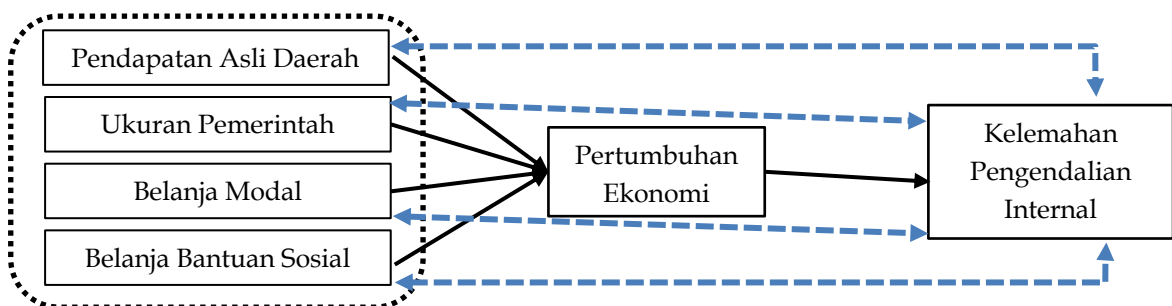
Namun, dalam praktiknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memunculkan tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah meningkatnya kompleksitas birokrasi, besarnya alokasi belanja modal

dalam program pembangunan dan peningkatan anggaran dalam program bantuan sosial (Rahman & Sumarni, 2024). Dalam kondisi seperti ini, peningkatan PAD diharapkan dapat dialokasikan untuk memperbaiki dan memperkuat pengendalian internal. Namun, jika pengelolaan PAD tidak disertai dengan penguatan sistem pengendalian internal yang memadai, peningkatan PAD justru dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran (Andesti & Agustin, 2022). Pemerintah daerah dengan aset besar cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, kompleksitas ini dapat meningkat lebih jauh, dan tanpa kapasitas pengawasan yang memadai, risiko kelemahan pengendalian internal semakin besar (Iqbal et al., 2017).

Adapun belanja modal yang tinggi mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah oleh pemerintah daerah yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, apabila pengendalian terhadap proyek-proyek infrastruktur dan alokasi dana tidak berjalan efektif, belanja modal yang besar dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan kelemahan dalam pengendalian internal (Mahdawi et al., 2021). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi variabel mediasi yang menentukan apakah belanja modal berkontribusi terhadap perbaikan pengendalian internal atau meningkatkan resiko kelemahan pengendalian internal. Pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh belanja sosial terhadap kelemahan pengendalian, tergantung efektivitas pengendalian dan penguatan akuntabilitas serta transparansi dalam penyaluran bantuan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiono (2020) metode kuantitatif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data yang dilakukan memiliki sifat kuantitatif yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Intervening*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang sudah tersedia dalam bentuk situs web, arsip, atau laporan. Data tersebut bersumber dari BPK daerah dan pemerintah daerah periode 2014 – 2023. Teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan aplikasi EViews 12. Pada penelitian ini dilakukan Uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji aukorelasi, uji koefisian determinasi, Uji statistik F, uji statistik T, dan uji analisis regresi.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari jumlah data (N), nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi variabel penelitian yang terdiri Kelemahan Pengendalian Internal (ICW), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Aset (SIZE), Belanja Modal (BM), dan Belanja Bantuan Sosial (BSOS). Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan EViews 12 dari variabel-variabel penelitian disajikan pada Statistik Deskriptif pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X ₁)	80	97.827.597.434	4.402.192.318.34 2	1.030.504.693.587	926.947.038.339
SIZE (X ₂)	80	19.302.730.000.462	25.779.780.599.7 45	8.270.042.901.110	7.130.299.244.87 7
BM (X ₃)	80	151.309.166.795	4.750.206.918.18 1	696.772.290.829	714.829.365.638
BSOS (X ₄)	80	0	72.861.518.066	9.705.460.239	10.985.026.670
PE (Z)	80	-7,36	8,05	4,5529	2,62306
ICW (Y)	80	2	20	8,5375	4,11833

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh PAD sebesar Rp97.827.597.434 yang terjadi pada Kota Serang pada tahun 2014, sedangkan nilai maksimum mencapai Rp4.402.192.318.342 yang dicapai oleh Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 dengan rata-rata PAD sebesar Rp1.030.504.693.587, dengan standar deviasi sebesar Rp926.947.038.339,72. Tingginya nilai standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata mengindikasikan adanya disparitas yang cukup tinggi dalam perolehan PAD antar daerah. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan fiskal daerah di Provinsi Banten tidak merata.

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE) yang diukur berdasarkan total aset. Nilai minimum total aset tercatat sebesar Rp1.930.273.000.462 yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 sedangkan nilai maksimum total aset mencapai Rp25.779.780.599.745 yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023. Rata-rata total aset Rp8.270.042.901.110, dengan standar deviasi Rp7.130.299.244.878. Hal ini menunjukkan bahwa

besaran total aset antar pemerintah daerah sangat bervariasi, yang juga merefleksikan kemampuan fiskal dan skala organisasi yang berbeda.

Variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan adanya variasi yang cukup besar. Nilai minimum Rp151.309.166.795 yang terjadi pada Kota Serang tahun 2014 sedangkan nilai maksimum belanja modal mencapai sebesar Rp4.750.206.918.18 yang dicapai Kota Tangerang Selatan pada tahun yang sama. Rata-rata belanja modal adalah s Rp696.772.290.829, dengan standar deviasi Rp714.829.365.638. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa terjadi variasi data yang tinggi dalam realisasi belanja modal antar pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Banten dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal.

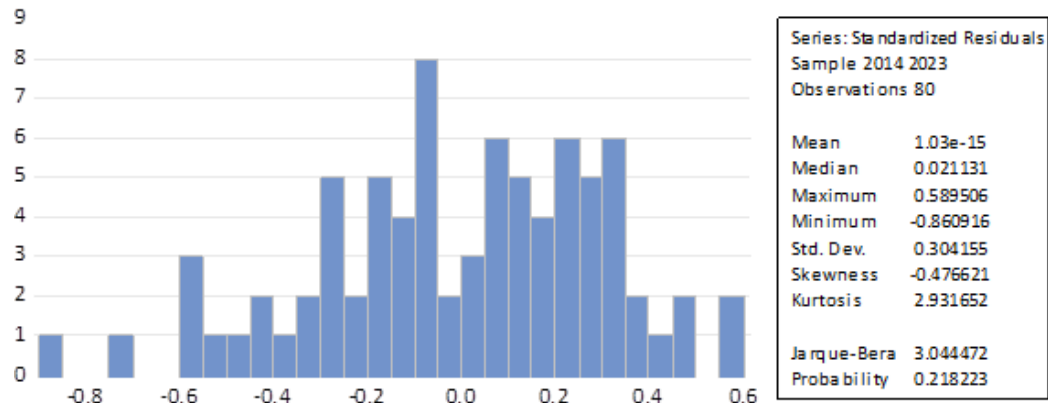
Variabel Belanja Bantuan Sosial (BSOS) memiliki nilai minimum sebesar Rp0 seperti yang terjadi pada Kota Tangerang Selatan tahun 2018 sedangkan belanja bantuan sosial maksimum mencapai Rp72.861.518.066 pada Kabupaten Tangerang tahun 2014. Rata-rata belanja bantuan sosial sebesar Rp9.705.460.239,24 dengan standar deviasi sebesar Rp10.985.026.670,34. Nilai minimum sebesar Rp.0 menunjukkan bahwa terdapat daerah yang pada tahun tertentu tidak merealisasikan belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup besar. Nilai minimum sebesar -7,36% terjadi pada Kota Tangerang pada tahun 2020 dan maksimum pertumbuhan ekonomi sebesar 8,05% pada Kota Tangerang Selatan tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55% dengan standar deviasi sebesar 2,62%. Nilai minimum yang ekstrem pada tahun 2020 mencerminkan dampak signifikan dari pandemic Covid-19 yang menyebabkan perlambatan bahkan kontraksi ekonomi di berbagai wilayah, baik secara nasional maupun global. Kota Tangerang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negative sebesar -7,36% pada tahun tersebut, mencerminkan tekanan ekonomi yang berat, seperti terjadinya pembatasan mobilitas (*lockdown*) dan penurunan aktivitas industri serta perdagangan. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 8,05% pada Kota Tangerang Selatan tahun 2015 menunjukkan adanya momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat di tahun tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini didorong oleh peningkatan investasi daerah, ekspansi sektor perdagangan besar dan eceran, real estate serta konstruksi yang pada tahun tersebut mengalami peningkatan. variabel ICW memiliki nilai minimum sebanyak 2 temuan pada Kota Tangerang Selatan tahun 2019 sedangkan nilai maksimum sebanyak 20 temuan yang terjadi pada Kabupaten Tangerang pada tahun 2023. Secara umum, rata-rata jumlah temuan sebesar 8,54 dengan standar deviasi sebesar 4,12 yang ini menunjukkan bahwa tingkat kelemahan pengendalian internal antar daerah cukup bervariasi namun tidak terlalu ekstrem. Artinya, Sebagian besar pemerintah daerah mengalami temuan yang berada dikisaran sekitar 4-8 temuan. Namun demikian, terdapat juga nilai ekstrem seperti yang terjadi pada Kabupaten Tangerang tahun 2023 dengan jumlah temuan mencapai 20.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model data yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output EViews 12 (2025)

Hasil uji normalitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa distribusi residual membentuk pola menyerupai bentuk lonceng (*bell-shaped*) pada histogram, yang merupakan indikasi visual bahwa data residual terdistribusi secara normal. Selanjutnya, berdasarkan statistik Jarque-Bera yang diperoleh sebesar 3.044472 dengan nilai probabilitas 0.218223, menunjukkan bahwa nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen di dalam model. Korelasi yang terlalu tinggi antar variabel bebas dapat menyebabkan masalah multikolinearitas, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan estimasi koefisien regresi dan menurunkan validitas interpretasi hasil analisis. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, salah satu metode yang umum digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF). VIF mengukur seberapa besar varians koefisien regresi meningkat karena adanya multikolinearitas. Dalam praktiknya, jika nilai VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut dianggap mengalami gejala multikolinearitas tinggi (Sugiyono, 2023). Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas dari data yang dihimpun peneliti:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	2.975386	2410.167	NA
PAD (X_1)	0.006753	4061.760	5.154919
SIZE (X_2)	0.009782	6867.128	4.572654
BM (X_3)	0.005760	3393.218	2.531148
BSOS (X_4)	2.34E-05	8.338051	1.266420

PE (Z)	0.004490	5.438958	1.355198

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan melalui nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF), dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model tidak mengalami gejala multikolinearitas yang serius. Hal ini terlihat dari nilai VIF untuk setiap variabel yang seluruhnya berada di bawah ambang batas umum yaitu 10. Secara rinci, variabel X_1 memiliki nilai VIF sebesar 5.15, X_2 sebesar 4.57, X_3 sebesar 2.53, X_4 sebesar 1.27, dan Z sebesar 1.36. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu kestabilan model regresi. Oleh karena itu, model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi tidak adanya multikolinearitas, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara lebih reliabel.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians error (residual) dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas) atau tidak (heteroskedastisitas). Asumsi homoskedastisitas sangat penting untuk dipenuhi karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi regresi menjadi tidak efisien dan standart eror menjadi tidak valid, yang akhirnya menyesatkan hasil uji t dan uji F. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Namun, jika di atas 0,05, maka model dianggap bebas dari masalah tersebut dan memenuhi asumsi homoskedastisitas (Eviews, 2020).

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.028444	Prob. F(5,74)	0.4073
Obs*R-squared	5.197954	Prob. Chi-Square(5)	0.3922
Scaled : explained SS	4.461260	Prob. Chi-Square(5)	0.4851

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,3922. Nilai probabilitas tersebut lebih dari 0,05. (H_0) yang menyatakan bahwa model regresi mengalami homoskedastisitas (varian residual konstan) tidak dapat ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Model telah memenuhi asumsi klasik homokedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran residual dari regresi bersifat konstan dan tidak tergantung pada nilai variabel independent sehingga hasil estimasi regresi valid.

Uji Autokorelasi

Uji Breusch-Godfrey digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi, khususnya pada model dengan lebih dari satu orde (lag.) Berbeda dengan uji Durbin-Watson yang terbatas pada autokorelasi orde pertama, uji ini mengevaluasi apakah residual berhubungan dengan lag-nya sendiri melalui regresi tambahan. Jika nilai probabilitas (*p-value*) dari uji ini di bawah 0,05, maka terdapat indikasi autokorelasi dalam model. Namun, jika di atas 0,05, maka model dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.426012	Prob. F(2,71)	0.2471
Obs*R-squared	3.050829	Prob. Chi-Square(2)	0.2175

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey, diperoleh nilai Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.2175. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05), sehingga hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi hingga lag ke-2 tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi tidak memiliki pola hubungan yang sistematis satu sama lain (bebas autokorelasi), baik pada lag pertama maupun kedua. Hal ini juga menandakan bahwa estimasi koefisien regresi sudah efisien dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap memenuhi asumsi bebas autokorelasi.

Uji Signifikan Simultan

Uji statistik F adalah salah satu uji signifikan simultan dalam regresi yang digunakan untuk menguji apakah seluruh koefisien regresi (selain konstanta) dalam model berbeda secara signifikan dari nol. Jika nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, misalnya 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F Persamaan 1

F-statistic	7.785391
Prob(F-statistic)	0.000006

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Hasil uji statistik F pada Persamaan 1 menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 7.785391 dengan nilai probabilitas $0.000006 < \text{tingkat signifikansi } 5\% (0,05)$. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak, yang berarti secara simultan variabel independen dalam model yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE), Belanja Modal (BM), Belanja Bantuan Sosial (BSOS), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Kelemahan Pengendalian Internal (ICW). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada Persamaan 1 adalah signifikan secara statistik dan mampu menjelaskan variasi dalam Kelemahan

Pengendalian Internal berdasarkan seluruh variabel independen dan *intervening* yang digunakan.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F Persamaan 2

F-statistic	21.27787
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Hasil uji statistik F pada Persamaan 2 menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 21.27787 dengan probabilitas (*Prob. F-statistic*) sebesar 0.000000. < signifikansi 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak. Artinya, secara simultan variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE), Belanja Modal (BM), Belanja Bantuan Sosial (BSOS) berpengaruh signifikan terhadap variabel *intervening* Pertumbuhan Ekonomi (PE). Dengan demikian, seluruh variabel independen yang digunakan dalam Persamaan 2 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE).

Uji Statistik T

Uji Statistik T merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi parsial dari masing-masing koefisien variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi dari hasil Statistik T dilengkapi dengan nilai probabilitas (*p-value*), yang menunjukkan kemungkinan terjadinya nilai Statistik T tertentu jika koefisien regresi sesungguhnya bernilai nol (hipotesis nol). Jika nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, misalnya 0,05 (5%), maka hipotesis nol ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik T Persamaan 1

Variable	Coefficient		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	-0.779093	1.724931	-0.451666	0.6528
PAD (X ₁)	0.294726	0.082175	3.586583	0.0006
SIZE (X ₂)	0.373902	0.098902	3.780519	0.0003
BM (X ₃)	0.023365	0.075894	0.307861	0.7591
BSOS (X ₄)	0.013772	0.004842	2.844487	0.0057
PE (Z)	0.165950	0.067008	2.476578	0.0155

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji Statistik T pada Persamaan 1 dengan menggunakan nilai t-tabel sebesar 1,99006 (taraf signifikansi 5%), maka interpretasi masing-masing variabel terhadap variabel dependen Kelemahan Pengendalian Internal (ICW) adalah sebagai berikut: (1) PAD memiliki koefisien sebesar 0,294726, *t-statistic* 3,586583, dan *p-value* 0,0006. Karena nilai *t-statistic* > t-tabel (3,586583 > 1,99006) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICW. Artinya, semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula potensi kelemahan pengendalian internal. Hal ini dapat terjadi

karena peningkatan ruang fiskal memberikan lebih banyak peluang pengelolaan keuangan yang apabila tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan risiko moral hazard dan lemahnya pengendalian internal; (2) SIZE memiliki koefisien sebesar 0,373902, nilai *t-statistic* sebesar 3,780519, dan *p-value* 0,0003. Karena nilai **t-statistic > t-tabel** (3,780519 > 1,99006) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SIZE berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICW. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, dilihat dari total aset, maka semakin tinggi kompleksitas tata kelola yang harus dihadapi. Jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kelemahan pengendalian internal; (3) BM memiliki koefisien 0,023365, *t-statistic* 0,307861, dan *p-value* 0,7591. Karena nilai *t-statistic* < t-tabel (0,307861 < 1,99006) dan *p-value* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa BM tidak berpengaruh signifikan terhadap ICW. Artinya, besar kecilnya alokasi belanja modal tidak memberikan pengaruh terhadap potensi kelemahan pengendalian internal dalam model penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan belanja modal seperti proyek infrastruktur yang proses pengadaannya diawasi secara ketat (melalui LPSE, dokumen kontrak, audit teknis, dll) sehingga risiko kelemahan pengendalian internal bisa diminimalkan; (4) BSOS menunjukkan koefisien sebesar 0,013772, nilai *t-statistic* 2,844487, dan *p-value* 0,0057. Karena nilai *t-statistic* > t-tabel (2,844487 > 1,99006) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa BSOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICW. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial cenderung disertai dengan peningkatan potensi kelemahan pengendalian internal. Hal ini dapat terjadi apabila penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak sesuai prosedur, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan dan moral hazard; (5) PE memiliki koefisien sebesar 0,165950, nilai *t-statistic* 2,476578, dan *p-value* sebesar 0,0155. Karena nilai *t-statistic* > t-tabel (2,476578 > 1,99006) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICW. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi, apabila tidak disertai peningkatan kapasitas pengendalian internal, justru dapat membuka celah kelemahan dalam tata kelola pemerintah daerah.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T Persamaan 2

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	6.985238	1.601088	4.362806	0.0000
PAD (X ₁)	0.386704	0.075237	5.139828	0.0000
SIZE (X ₂)	0.227973	0.094240	2.419083	0.0180
BM (X ₃)	0.378100	0.069057	5.475161	0.0000
BSOS (X ₄)	0.023036	0.004426	5.204412	0.0000

Sumber: Output EViews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji Statistik T pada Persamaan 2 dengan menggunakan nilai t-tabel sebesar 1,99006 (taraf signifikansi 5%), maka interpretasi masing-masing variabel terhadap variabel *intervening* Pertumbuhan Ekonomi (PE)

adalah sebagai berikut: (1) PAD memiliki koefisien sebesar 0,386704, nilai *t-statistic* 5,139828, dan *p-value* 0,0000. Karena nilai *t-statistic* > *t-tabel* ($5,139828 > 1,99006$) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Artinya, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal yang dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja pembangunan dan layanan publik yang lebih optimal; (2) SIZE memiliki koefisien sebesar 0,227973, nilai *t-statistic* 2,419083, dan *p-value* 0,0180. Karena nilai *t-statistic* > *t-tabel* ($2,419083 > 1,99006$) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SIZE berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam melakukan investasi publik. Hal ini dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah; (3) BM memiliki koefisien sebesar 0,378100, nilai *t-statistic* 5,475161, dan *p-value* 0,0000. Karena nilai *t-statistic* > *t-tabel* ($5,475161 > 1,99006$) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal, seperti pada infrastruktur dan pengadaan aset tetap, mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terjadi karena belanja modal dapat menciptakan efek berganda (*multiple effect*) yang mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah; (4) BSOS memiliki koefisien sebesar 0,023036, nilai *t-statistic* 5,204412, dan *p-value* 0,0000. Karena nilai ***t-statistic*** > ***t-tabel*** ($5,204412 > 1,99006$) dan *p-value* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa BSOS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Artinya, semakin besar alokasi belanja bantuan sosial yang disalurkan secara tepat sasaran, maka akan mendorong daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan daya beli ini berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Uji Sobel

Uji Sobel merupakan salah satu metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi (*intervening*) dari suatu variabel perantara terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi. Dalam konteks penelitian mediasi, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen disalurkan secara signifikan melalui variabel mediasi. Uji Sobel menghitung besarnya pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui mediator, dengan memanfaatkan nilai koefisien regresi dan standar error dari jalur X ke Z (a) dan dari Z ke Y (b). Berikut merupakan hasil uji sobel yang dilakukan peneliti menggunakan bantuan kalkulator sobel:

Tabel 10. Hasil Uji PAD Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.386704	Sobel test: 2.23108039	0.02876343	0.0256758
b	0.16595	Aroian test: 2.19757985	0.02920191	0.02797906
s _a	0.075237	Goodman test: 2.26616125	0.02831817	0.02344151
s _b	0.067008	Reset all	Calculate	

Sumber : Output dari <https://quantpsy.org/sobel>

Berdasarkan hasil uji Sobel yang menguji pengaruh PAD terhadap Kelemahan ICW melalui PE sebagai variabel *intervening*, diperoleh nilai statistik uji Sobel sebesar 2.231 dengan nilai *p-value* sebesar 0.0257. Nilai *p-value* ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa PE secara signifikan memediasi pengaruh antara PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Internal (ICW). Artinya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya memengaruhi ICW secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai perantara yang memperkuat atau memperjelas hubungan antara peningkatan PAD dan potensi kelemahan pengendalian internal.

Tabel 11. Hasil Uji SIZE Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.227973	Sobel test: 1.73051137	0.02186181	0.08353895
b	0.16595	Aroian test: 1.66254307	0.02275557	0.09640394
s _a	0.09424	Goodman test: 1.80756102	0.02092993	0.07067485
s _b	0.067008	Reset all	Calculate	

Sumber: Output dari <https://quantpsy.org/sobel>

Berdasarkan hasil uji Sobel yang menguji pengaruh SIZE terhadap Kelemahan ICW melalui PE sebagai variabel *intervening*, diperoleh nilai statistik uji Sobel sebesar 1.731 dengan nilai *p-value* sebesar 0.0835. Karena nilai *p-value* tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PE tidak secara signifikan memediasi pengaruh antara SIZE terhadap ICW. Dengan demikian, meskipun total aset memiliki pengaruh langsung terhadap ICW, namun jalur tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi belum terbukti signifikan.

Tabel 12. Hasil Uji BM Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.3781	Sobel test: 2.25646901	0.02780703	0.02404127
b	0.16595	Aroian test: 2.22585984	0.02818942	0.02602357
s _a	0.069057	Goodman test: 2.28837671	0.0274193	0.02211559
s _b	0.067008	Reset all	Calculate	

Sumber: Output dari <https://quantpsy.org/sobel>

Berdasarkan hasil uji Sobel yang menguji pengaruh BM terhadap ICW melalui PE sebagai variabel *intervening*, diperoleh nilai statistik uji Sobel sebesar 2.2565 dengan *p-value* sebesar 0.0240. Karena nilai *p-value* ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PE secara signifikan memediasi pengaruh antara BM terhadap ICW.

Tabel 13. Hasil Uji BSOS Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai *Intervening*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.023036	Sobel test: 2.2363071	0.00170944	0.02533166
b	0.16595	Aroian test: 2.20339161	0.00173497	0.02756716
s _a	0.004426	Goodman test: 2.2707432	0.00168351	0.02316253
s _b	0.067008	Reset all	Calculate	

Sumber : Output dari <https://quantpsy.org/sobel>

Berdasarkan hasil uji Sobel yang menguji pengaruh BSOS terhadap ICW melalui PE sebagai variabel *intervening*, diperoleh nilai statistik uji Sobel sebesar 2.2363 dengan *p-value* sebesar 0.0253. Karena nilai *p-value* ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PE secara signifikan memediasi pengaruh antara BSOS terhadap ICW. Dapat disimpulkan pengaruh belanja bantuan sosial terhadap Kelemahan Pengendalian internal tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka pengujian hipotesis dapat disimpulkan dalam rangkuman berikut.

Tabel 14. Simpulan Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Variabel	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel <i>intervening</i>	Positif	Diterima
2	Pengaruh SIZE terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel <i>intervening</i>	Negatif	Ditolak

3	Pengaruh BM terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel <i>intervening</i>	Positif	Diterima
4	Pengaruh BSOS terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel <i>intervening</i>	Positif	Diterima
5	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal	Positif	Diterima

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*

Hasil analisis uji sobel memperoleh nilai statistik 2.231 dengan *p-value* $0.0257 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal (**H₁ Diterima**). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kelemahan sistem pengendalian internal melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah. PAD merupakan indikator utama kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan otonomi. Selain menjadi alat untuk membiayai operasional dan pembangunan, PAD juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan akuntabel (Marcelleno et al., 2023). Penelitian oleh (Asmoro et al., 2022; Mahdawi et al., 2021; Mulyani et al., 2021) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, sebagai hasil dari pengelolaan PAD yang produktif, di satu sisi berperan sebagai pencapaian strategis pemerintah daerah. Namun di sisi lain, seperti yang dikemukakan oleh (ANSAR & OHORELA, 2022), pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat memunculkan kompleksitas birokrasi dan meningkatnya beban administrasi, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan. Jika pertumbuhan ini tidak disertai dengan peningkatan kapasitas pengendalian internal, maka risiko terjadinya penyimpangan keuangan dan kelemahan tata kelola menjadi lebih besar.

Pengaruh SIZE terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*

Hasil uji Sobel menunjukkan nilai statistik 1.731 dengan *p-value* sebesar $0.0835 > 0,05$. Sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak secara signifikan memediasi hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal (**H₂ ditolak**). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi jembatan antara besarnya aset pemerintah daerah dan efektivitas pengendalian internal, dalam konteks empiris penelitian ini peran mediasi tersebut tidak signifikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di sejumlah daerah belum optimal. Banyak aset yang tidak tercatat secara akurat, yang dapat menimbulkan potensi kerugian

negara. Sebagai contoh, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 yang disampaikan pada Mei 2020, BPK menemukan bahwa di Kota Cilegon, penatausahaan asset tetap belum dilaksanakan secara memadai. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tidak melakukan pencatatan asset secara benar, seperti terdapat asset yang belum dihapus meskipun sudah tidak dapat lagi digunakan serta ketidaksesuaian nilai asset antara laporan dan kondisi riil (Banten, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan asset, meskipun Kota Cilegon termasuk dalam daerah dengan nilai asset yang besar. Memperkuat penelitian sebelumnya bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar dapat meningkatkan potensi kelemahan pengendalian internal (ICW) apabila tidak diiringi oleh penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan aktivitas produksi barang dan jasa, yang sering diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (Boediono, 1985 dalam (Andesti & Agustin, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal, yang secara teoritis dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal (Anthony & Rohman, 2024).

Pengaruh BM terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*

Berdasarkan hasil uji Sobel, diperoleh nilai statistik 2.2565 dengan *p-value* $0.0240 < 0,05$. Sehingga Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal sehingga hipotesis (**H₃ diterima**). Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel *intervening* yang signifikan dalam menjembatani hubungan antara alokasi belanja modal dan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah.

Belanja modal dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan kelemahan pengendalian internal jika sistem pengawasan dan evaluasi proyek tidak berjalan optimal. Seperti yang dikemukakan oleh (ANSAR & OHORELA, 2022; Kiswanto et al., 2020; Subowo, 2020) proyek-proyek pembangunan yang berjalan secara simultan seringkali menimbulkan beban administrasi dan operasional yang tinggi, membuka peluang terjadinya moral hazard, serta memperlemah mekanisme kontrol internal. Penelitian (Teknologi & Desain, 1805) mengungkapkan bahwa belanja modal yang dialokasikan secara produktif dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari belanja modal juga membawa implikasi baru, yaitu meningkatnya volume transaksi keuangan dan ekspansi program pembangunan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai katalis, namun juga sebagai tantangan dalam penguatan sistem pengendalian internal. Seperti ditegaskan oleh (ANSAR & OHORELA, 2022) pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu diiringi oleh kesiapan institusional dalam hal pengawasan dan pengendalian internal, sehingga justru dapat memperbesar celah terjadinya *fraud*, ketidakefisienan, dan kesalahan pelaporan.

Pengaruh BSOS terhadap kelemahan pengendalian internal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*

Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 2.2363 dengan *p-value* sebesar $0.0253 < 0,05$. Sehingga Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh antara Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelemahan Pengendalian Internal (ICW). Dengan demikian, hipotesis (**H₄ diterima**). Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai mekanisme transisi dalam menjelaskan bagaimana belanja bantuan sosial berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Studi oleh (Sari & Darmastuti, 2023) menunjukkan bahwa semakin besar alokasi belanja bantuan sosial, semakin tinggi pula risiko kelemahan pengendalian internal, khususnya jika tidak disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat. Namun demikian, belanja bantuan sosial yang dikelola dengan tata kelola yang baik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika bantuan disalurkan secara tepat dan produktif, konsumsi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah meningkat, mendorong permintaan barang dan jasa, serta memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal. Penelitian oleh (Putra et al., 2015) serta (Sulistiyani, 2022) menggarisbawahi bahwa efektivitas belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada sistem pengendalian yang akuntabel dan efisien.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal

Berdasarkan hasil analisis regresi uji statistik T variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisien sebesar 0,165950, *t-statistic* sebesar 2,476578, dan *p-value* sebesar 0,0155. Karena nilai *t-statistic* lebih besar dari *t-tabel* 1,99006 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal sehingga hipotesis **H₅ diterima**. Artinya, peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sistem pengawasan dan pengendalian internal justru dapat memperbesar celah terjadinya kelemahan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, diketahui bahwa Pemerintah Kota Serang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari -1,29% pada tahun 2021 menjadi 3,88% pada tahun 2022. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten, jumlah temuan kelemahan pengendalian internal di Kota Serang juga meningkat, dari 11 temuan pada tahun 2021 menjadi 16 temuan pada tahun 2022. Salah satu penyebab utama peningkatan tersebut adalah lemahnya pengelolaan pendapatan dari retribusi daerah. Hal ini mendukung temuan penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah.

(ANSAR & OHORELA, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat berdampak pada meningkatnya jumlah dan kompleksitas program pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan terhadap sistem pengendalian internal yang belum

mengalami peningkatan sepadan. Dalam kondisi tersebut, pengawasan menjadi lemah, dan celah-celah penyimpangan semakin terbuka. Tanpa penguatan struktur birokrasi, peningkatan anggaran justru berisiko memunculkan praktik inefisiensi, penyalahgunaan anggaran, hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_1 dalam penelitian ini diterima. Temuan ini memberikan arti bahwa peningkatan PAD tidak hanya berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai jalur tidak langsung yang menghubungkan kemandirian fiskal dengan tata kelola keuangan daerah, yang jika tidak diiringi penguatan sistem pengawasan, dapat memunculkan kelemahan pengendalian internal.
2. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah dan Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_2 dalam penelitian ini ditolak. Temuan ini memberikan arti bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah, yang tercermin dari total aset yang dikelola, lebih berpengaruh secara langsung terhadap kelemahan pengendalian internal, tanpa melalui peran pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran organisasi belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan yang memadai.
3. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_3 dalam penelitian ini diterima. Temuan ini memberikan arti bahwa alokasi belanja modal yang tinggi oleh pemerintah daerah tidak hanya berdampak langsung terhadap pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kelemahan sistem pengendalian internal melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat belanja modal dapat memperbesar volume kegiatan dan kompleksitas pengelolaan anggaran, yang jika tidak diiringi dengan penguatan pengawasan, berpotensi menimbulkan kelemahan tata kelola keuangan.
4. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan memediasi pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_4 dalam penelitian ini diterima. Temuan ini memberikan arti bahwa belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga dapat meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Tanpa sistem pengendalian internal yang kuat, hal ini dapat memperbesar risiko penyimpangan dan ketidakefisienan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja bantuan sosial memerlukan tata kelola yang akuntabel dan pengawasan yang efektif untuk mencegah munculnya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori agensi.

5. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_5 dalam penelitian ini diterima. Temuan ini memberikan arti bahwa peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sistem pengawasan dan pengendalian internal justru dapat memperbesar risiko kelemahan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang cepat menciptakan tekanan tambahan terhadap struktur birokrasi dan pengelolaan anggaran, sehingga menuntut penguatan sistem pengendalian internal. Temuan ini konsisten dengan teori agensi yang menekankan bahwa pertumbuhan kapasitas fiskal harus diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah terjadinya moral hazard dan penyalahgunaan anggaran.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya bergantung pada data sekunder yang membuat eksplorasi penelitian ini menjadi terbatas, dapat menambahkan variabel-variabel dengan sifat kualitatif seperti kapasitas manajerial, integritas aparatur, atau kualitas pelaksanaan audit internal yang dapat memengaruhi kelemahan pengendalian internal. Serta variabel *intervening* dapat ditambah, seperti kualitas audit internal, kompetensi aparatur pengelola keuangan, efisiensi birokrasi, atau variabel lainnya yang dapat melengkapi penelitian ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Andesti, M., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.468>
- ANSAR, R., & OHORELA, R. W. U. (2022). The Effect of Local Government Size, Regional Complexity, Capital Expenditure, PAD, and Economic Growth on Weaknesses of Local Government Internal Control. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(2), 242–251. <https://doi.org/10.38142/ijess.v3i2.165>
- Anthony, A. R., & Rohman, R. (2024). Pengaruh Peningkatan PAD dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2), 1–12.
- Asmoro, F. A. F., Hasmarini, M. I., & Fakhruddin, H. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1788. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3023>
- Banten, B. P. P. (2021). *Lapora Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021*.
- BPK Banten. (2023). *SIARAN PERS BPK Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang*. 250025.
- Iqbal, M., Tanjung, A. R., & Supriono. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan kota provinsi riau dan sumatera barat). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 881–895. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12584>
- Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (2005). The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview. *SSRN Electronic Journal*, 2–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.244161>

- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Lazty Mahera, Y. (2020). Factors Influencing the Weaknesses of Internal Control of Local Governments in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 122–129. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8118>
- Mahdawi, Notonegoro, K., Rustam, R., Saputra, J., Ilham, R. N., Hutaaruk, R. P. S., Damanik, S. W. H., & Siregar, A. (2021). The effect of local own-source revenue and capital expenditure on economic growth: An empirical evidence from Aceh province, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 149–157. <https://doi.org/10.46254/an11.20210845>
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>
- Mulyani, E. S., Sudarman, S., & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.894>
- Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. (2020). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*.
- Putra, Purnamadewi, & Sahara. (2015). DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL The effect Of Social Aid To Economic Growth And Poverty. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(3), 161–171.
- Rahman, Z., & Sumarni, S. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jesya*, 7(1), 1183–1193. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1575>
- Sari, D. N., & Darmastuti, D. (2023). Internal control weaknesses: Its relationship with local government characteristics and follow-up on audit results. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(1), 97–105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art10>
- Subowo, T. (2020). The Role Of The Level Of Completion Of The Follow-Up Of The Audit Results In Moderating The Factor The Weakness Of Internal Control System. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1), 43.
- Sugiyono. (2023). Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–257. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Sulistiyan, T. (2022). *Khozana : Journal of Islamic Economic and Banking Khozana : Journal of Islamic Economic and Banking*. 5(1), 13–27.

Teknologi, P., & Desain, D. (1805). *Berajah Journal*. 615–624.